

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak didunia. Laporan *Worldometers* per tanggal 31 Januari 2023 mencatat bahwa Indonesia mendominasi jumlah penduduk di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk mencapai 273,52 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan 40,9% dari total penduduk di Asia Tenggara yang saat ini mencapai 668,61 jiwa. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pula pada kebutuhan alat transportasi guna untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Infrastruktur termasuk salah satu bagian krusial dalam kelancaran mobilitas aktivitas masyarakat. Suksesnya pembangunan infrastruktur di Indonesia didukung dengan adanya dana pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Menurut Undang – Undang KUP ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada APBN KITA tahun 2023, Kementrian Keuangan mencatat bahwa pada akhir januari 2023 pendapatan negara atas pajak dan PNBPN mengalami

kenaikan dari target. Secara nominal, realisasi komponen penerimaan negara atas pajak mencapai Rp 186,34 Triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 45,86 Triliun. Hasil tersebut dalam presentase mengalami kenaikan penerimaan pajak mencapai 9,22 % dan PNBP 10,39 % dari target yang sama seperti tahun 2022 lalu.

Pembangunan ialah salah satu kegiatan mewujudkan tujuan nasional yang berkesinambungan. Peningkatan kesejahteraan rakyat dari segi pembangunan nasional tentunya memerlukan peranan dan aspek dukungan pemerintah. Berkaca pada perkembangan Indonesia saat ini, pemerintah serentak melakukan pembangunan dalam rangka kemajuan negara dari segi infrastruktur. Mengarah pada pengertian pajak daerah, hal tersebut tentunya menuntut setiap daerah untuk membangun daerahnya sendiri dan dengan didukung kebijakan otonomi daerah yang diperlakukan oleh pemerintah pusat agar pemerintahan daerah lebih mandiri dalam menata daerahnya, yang dengan keuntungan lain dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah sendiri memiliki pemasukan atas pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga undang-undang tersebut memberikan rujukan bahwa pemerintah telah

memiliki pemasukan yang berasal dari pajak daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah dan bersifat memaksa guna kemakmuran daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu: pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tersebut juga disebutkan bahwa terdapat lima jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pendapatan pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kondisi jumlah penduduk yang semakin meningkat, tentunya berdampak pada mobilitas kebutuhan alat transportasi masyarakat itu sendiri di setiap tahunnya. Apabila kepemilikan kendaraan bermotor meningkat, maka potensi penerimaan pajak yang berasal dari pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

Pendapatan pajak kendaraan bermotor pastinya mengalami perbedaan disetiap tahunnya, bisa saja mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan. Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 1.343.164 jiwa per periode 2022, dengan tingkat pertumbuhan 0,14%. (Badan Pusat Statistik, Bojonegoro, 2022). Berdasarkan jumlah penduduk yang dimiliki dengan segala kalangan usia, menurut data yang dilampirkan oleh KB SAMSAT Bojonegoro pada 31

Desember lalu terdapat penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan yang Masih Membayar Pajak

Tahun	Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2019	333.521
2020	328.960
2021	327.762
2022	331.300

Sumber: Data Arsip KB SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1.2 Realisasi Kendaraan yang Membayar Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB):

Tahun	Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2019	337.124
2020	322.359
2021	316.944
2022	335.422

Sumber: Data Arsip KB SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.

Merujuk pada tabel 1.1 dan 1.2 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persenan anggaran dan realisasi penerimaan pajak atas anggaran dan realisasi penerimaan pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) KB SAMSAT Bojonegoro yakni ; (1) pada tahun 2019 anggaran dan realisasi penerimaan pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) KB SAMSAT Bojonegoro mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan keterangan anggaran mengalami kenaikan sebesar 3.603 dari target, (2) namun pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup sangat jauh dari target penerimaan pajak. Meskipun pada tahun 2022 lalu penerimaan pajak atas pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan, tetap saja sebagai

pemerintah perlu memperbaiki kondisi yang ada dan tidak melupakan masalah penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 hingga 2021 lalu.

Pada kenyataannya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk mendorong terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan. Kajian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat penting dilakukan karena hal tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak. Beberapa faktor seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan membandingkan pengaruh faktor pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam kegiatan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa pemahaman tentang sistem perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah dilakukannya pajak progresif. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif (Danarsi, Hendro Subroto, 2017). Variabel sanksi pajak dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak juga didukung dengan hasil penelitian (Rahman Adi Nugroho, 2012) yang mengatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi factor terpenting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak disuatu Negara.

Selain beberapa penelitian terdahulu yang mendukung bahwa terdapat hasil bahwa variabel pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan pihak SAMSAT Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan bahwa latar belakang masalah yang peneliti anggap sebagai dasar pengambilan judul penelitian yang akan peneliti laksanakan. Pada hasil wawancara dengan pegawai pajak di KB SAMSAT Bojonegoro mengatakan bahwa terdapat kurangnya partisipasi dan minimnya sosialisasi dibidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan hasil wawancara dengan pegawai pajak KB SAMSAT Kapupaten Bojonegoro yang sudah peneliti rangkum, peneliti merasa terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dengan penelitian lainnya. Sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali dan menambah variabel baru terhadap kepatuhan pajak pada pajak kendaraan bermotor dengan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Peneliti menggunakan sampel yang berasal dari wajib pajak yang membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya di Kantor bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro. Sehingga peneliti memilih judul: **“ANALISIS**

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KABUPATEN BOJONEGORO. (Studi kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan didukung dengan permasalahan yang ada, didapatkan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut yang nantinya akan dibahas pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro. Secara khusus, tujuan penelitian ini memperoleh bukti yang menjawab sebagaimana identifikasi masalah ialah sebagai berikut :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.
2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.
4. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian yang dimaksudkan oleh penulis dapat memberikan manfaat yang dijelaskan pada uraian sub bab 1.4.1 dan manfaat penelitian yang diuraikan pada sub bab 1.4.2.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ialah :

- 1) Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.
- 4) Mengetahui apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.
- 5) Sebagai bahan akademis untuk mengembangkan informasi pada mata kuliah perpajakan berdasarkan hasil penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat penelitian secara praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan uraian manfaat sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan bukti mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bojonegoro.
2. Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu meningkatnya keefektifitasan wajib pajak badan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga terdapat jumlah penerimaan yang sesuai dengan rencana anggaran penerimaan atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Melalui penelitian ini, peneliti juga berharap dapat membantu pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengevaluasi undang-undang yang mengatur kesadaran serta kewajiban perpajakan, dan perilaku seorang wajib pajak. Yang mana, melalui hasil penelitian ini nantinya menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan tentang pajak yang dirasa menguntungkan bagi negara serta mengurangi kerugian negara atas anggaran dimasa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam memberikan gambaran secara jelas mengenai penelitian yang penulis buat, maka dalam sistematika penulisan penelitian ini diuraikan menjadi lima bagian yang akan dijelaskan oleh penulis ialah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini mengkaji latar belakang terkait isu permasalahan yang peneliti rasa perlu dilaksanakannya penelitian. Sehingga nantinya muncul beberapa rumusan masalah dan ditetapkannya sebagai hipotesis penelitian. Kemudian dijelaskan pula mengenai tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian serta bagaimana sistematika penulisan laporan penelitian ini ditentukan.

BAB II TUJUAN PUSTAKA

Pada bagian bab dua ini, penulis menerangkan mengenai teori-teori yang selaras dan melandasi hubungan dengan sampel penelitian yang dilakukan serta menguraikan beberapa bukti atas penelitian terdahulu sebagai bahan acuan penelitian serta perumusan hipotesis dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian bab tiga ini, penulis memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan. Yang mana pada bab ini membahas tentang objek dan subjek penelitian, serta

populasi dan sampel, serta penjelasan operasional variabel. Kemudian menjelaskan tentang model, jenis dan teknik pengumpulan data yang membantu sebagai bahan tambahan bukti akhir penelitian dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab empat ini, penulis menerangkan mengenai hasil dari pengujian atas metode uji yang diuraikan pada bab III dengan menginterpretasikan kedalam kalimat berdasarkan hasil uji menggunakan aplikasi *Statistic Product and Service Solution* (SPSS) *version 26* yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab lima ini, penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai jabaran isi penelitian dan bagaimana pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan. Kemudian penulis memberikan saran yang kiranya dapat membantu pembaca pun kepada peneliti di kemudian hari jika akan melakukan penelitian dengan topik yang sama pada masa mendatang.